

PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS ATAS HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap ahli waris atas harta waris dalam perspektif peraturan perundang undangan dan akibat hukum yang timbul terhadap harta warisan yang dijadikan jaminan tidak mendapat persetujuan ahli waris atas harta waris. Tipe penelitian ini yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yaitu Perlindungan hukum terhadap ahli waris atas harta warisan dalam perspektif perundang-undangan yaitu ahli waris yang tidak mendapatkan hak waris. Dengan adanya situasi di mana salah satu ahli waris menguasai harta waris, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak mutlak yang diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukum yang timbul terhadap harta warisan yang dijadikan jaminan tidak mendapat persetujuan ahli waris atas harta warisan adalah batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian batal demi hukum. Sertifikat tanah waris diagunkan oleh ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, dalam hukum perjanjian, sebuah perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Mengingat bunyi Pasal 1320 KUH Perdata supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, yang dijaminakan tidak meminta persetujuan seluruh ahli waris atau tanpa sepengetahuan salah satu ahli waris, maka proses pengajuan APHT tidak bisa dilakukan. Patut dicatat, pada saat pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan APHT, harus sudah ada keyakinan pada Notaris atau PPAT yang bersangkutan.

Kata kunci : *Ahli Waris, Harta Warisan dan Jaminan Bank*

LEGAL PROTECTION OF HEIR OVER INHERITANCE PROPERTY FROM THE PERSPECTIVE OF LEGISLATION

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze legal protection for heirs over inheritance assets in the perspective of laws and regulations and the legal consequences that arise for inheritance assets that are used as collateral without the consent of the heirs over the inheritance assets. This type of research is normative juridical and the approach used is the legislative approach, conceptual approach and case approach. The results of the study are legal protection for heirs over inheritance assets in the perspective of laws, namely heirs who do not receive inheritance rights. With the situation where one of the heirs controls the inheritance assets, this can be considered a violation of the absolute rights regulated in Article 913 of the Civil Code. The legal consequences that arise for inheritance assets that are used as collateral without the consent of the heirs over the inheritance assets are null and void, because they do not meet the objective requirements, the agreement is null and void. The inheritance land certificate is pledged by the heirs without the consent of the other heirs, in contract law, an agreement made by an unauthorized person results in the agreement being null and void. Given the sound of Article 1320 of the Civil Code, in order for a valid agreement to occur, four conditions of agreement must be met by those who bind themselves. the collateral does not ask for the approval of all heirs or without the knowledge of one of the heirs, then the APHT submission process cannot be carried out. It should be noted, at the time of making the Power of Attorney to Charge Mortgage Rights (SKMHT) and APHT, there must be confidence in the Notary or PPAT concerned.

Keywords: Heirs, Inheritance and Bank Guarantee